

**STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BATAM**

**Laporan Keuangan Unaudited Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Penyusunan Laporan Keuangan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Batam, 31 Desember 2023

Kepala



M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si
NIP. 1978012320031 2 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Singkatan	vi
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan	vii
Pernyataan Tanggung jawab	x
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi	15
C. Penjelasan Atas-Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan Atas pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas	39
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	42
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022	21
Tabel 2 Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022	21
Tabel 3 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022	22
Tabel 4 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022	22
Tabel 5 Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022	22
Tabel 6 Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022	23
Tabel 7 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek	23
Tabel 8 Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022	24
Tabel 9 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022	24
Tabel 10 Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022	24
Tabel 11 Rincian Mutasi Tanah	25
Tabel 12 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	25
Tabel 13 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023	26
Tabel 14 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
Tabel 15 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	27
Tabel 16 Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022	
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
Tabel 18 Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022	28
Tabel 19 Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022	29
Tabel 20 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2023	29
Tabel 21 Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023	29
Tabel 22 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	30
Tabel 23 Rincian Mutasi Aset Lain-lain	31
Tabel 24 Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023	31
Tabel 25 Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2023	31
Tabel 26 Perbandingan Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	32
Tabel 27 Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023	32
Tabel 28 Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022	32
Tabel 29 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022	33
Tabel 30 Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	33
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	34
Tabel 32 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	35
Tabel 33 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	36

Tabel 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	
Tabel 35 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022	37
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	37
Tabel 37 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	38
Tabel 38 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 dan 2022	38
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	39
Tabel 40 Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023	40
Tabel 41 Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023	40
Tabel 42 Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023	40
Tabel 43 Transaksi Antar Entitas TA 2023	41
Tabel 44 Transaksi Antar Entitas TA 2023	41
Tabel 45 Transaksi Antar Entitas TA 2023	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laporan Realisasi Anggaran	1
Gambar 2 Neraca	4
Gambar 3 Laporan Operasional	5
Gambar 4 Laporan Perubahan Ekuitas	6

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-LP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
BAS	: Bagan Akun Standar
KUN	: Kas Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Catatan	B.2.1.	Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah

BELANJA NEGARA

Catatan	B.2.2	Belanja Negara
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat

NERACA

ASET

		Aset Lancar
Catatan	C.2.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan
Catatan	C.2.3	Kas Pada Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.4	Piutang Pajak
Catatan	C.2.5	Piutang Bukan Pajak
Catatan	C.2.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Catatan	C.2.7	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Catatan	C.2.8	Uang Muka Belanja
Catatan	C.2.9	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.10	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.11	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan

		Umum
Catatan	C.2.12	Piutang Lainnya
Catatan	C.2.13	Persediaan
Catatan	C.2.14	Persediaan Badan Layanan Umum
		Inventasi Jangka Panjang
Catatan	C.2.15	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.16	Investasi Permanen Badan Layanan Umum
Catatan	C.2.18	Aset Tetap
Catatan	C.2.19	Aset Lainnya
KEWAJIBAN		
		Kewajiban Jangka Pendek
Catatan	C.2.20	Utang Kepada Pihak Ketiga
Catatan	C.2.21	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Catatan	C.2.23	Uang Muka dari Rekening Khusus
Catatan	C.2.24	Uang Muka dari BUN
Catatan	C.2.25	Uang Muka dari KPPN
Catatan	C.2.26	Pendapatan Yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.27	Utang Jangka Pendek Lainnya
EKUITAS		
Catatan	C.2.28	Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
		Ekuitas Dana Lancar
Catatan	C.2.29	Dana Lancar Lainnya
Catatan	C.2.30	Cadangan Piutang
Catatan	C.2.31	Cadangan Persediaan
Catatan	C.2.32	Pendapatan Yang Ditangguhkan
Catatan	C.2.33	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
		Ekuitas Dana Investasi
Catatan	C.2.34	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Catatan	C.2.35	Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Catatan

C.2.36

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Catatan

C.2.37

Dana Yang Harus Disediakan Untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional , (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawan UAKPA Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan.



Batam,31 Desember 2023
Kepala,

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si
N.P. 1978012320031 2 1001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor SKIPM Batam Tahun 2023 Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 781,933,100 atau mencapai 120.30 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.650.010.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 6,215,470,69 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.280.700.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11,478,955,760 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 124,750,333; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 11,354,205,427; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 16,005,200 dan Rp. 11,461,100,160.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 772,555,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 6,556,462,722 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5,783,907,722). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. (21.121.900) dan Rp. (3.128.023.893) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (3.128.023.893)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 11.795.267.935 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (5,805,029,622) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 12,887,000 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 5,457,974,847, kenaikan/penurunan ekuitas Rp. (334,167,775) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 11,461,100,160.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2023				Th 2022
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	650.010.000	781,933,100	(347.311.900)	46,57	696,012,722
Jumlah Pendapatan dan Hibah		650.010.000	781.933.100	(347.311.900)	46,57	696,012,722
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	3,109,863,000	3,076,088,880	(33,774,120)	99	2,993,142,968
Belanja Barang	B.4	3,111,837,000	3,081,388,817	(30,448,183)	99	2,742,668,17
Belanja Modal	B.5	59,000,000	57,993,000	1,007,000	98	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja		6,280,700,000	6,215,470,697	(57,759,857)	99,00	5,735,811,143

Gambar.1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian		2023	2022
ASET	Catatan		
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.1.7	0	0
Jumlah piutang jangka panjang	C.1.8	0	0
Persediaan	C.1.9	124,750,333.	163,588,245
JUMLAH ASET LANCAR		124,750,333.	163,588,245
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	8,525,430,000.	8,525,430,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8,389,718,428.	8,333,660,428
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1,962,797,000.	1,962,797,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1,520,089,000.	1,520,089,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	41,168,000.	41,168,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0.	30,500,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.7	(9,084,997,001)	(8,763,941,638)
JUMLAH ASET TETAP		11,354,205,427.	11,649,702,790
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-lain	C.3.1	0.	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.2	0.	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0.	0
JUMLAH ASET		11,478,955,760.	11,813,291,035
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	16,005,200.	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	0	
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.4	16,005,200.	0
JUMLAH KEWAJIBAN	C.4.5	16,005,200	0
EKUITAS			
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5.1	11,461,100,160.	26,012,859,717
JUMLAH EKUITAS		11,461,100,160.	26,012,859,717
JUMLAH EKUITAS		11,461,100,160.	26,012,859,717
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,477,105,360	26,078,223,920

Gambar.2

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL		0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL		0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	772,555,000.	680,390,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		772,555,000.	680,390,000
Jumlah Pendapatan		772,555,000.	772,555,000.
BEBAN OPERASIONAL	D.2	0.	0.
Beban Pegawai	D.3	3,076,088,880	1,575,695,625
Beban Persediaan	D.4	272,914,399	21,338,100.
Beban Barang dan Jasa	D.5	1,794,839,715.	907,493,036.
Beban Pemeliharaan	D.6	440,113,905.	120,259,300.
Beban Perjalanan Dinas	D.7	649,515,460.	174,415,600.
Beban Penyusutan dan Amortisasi		322,990,363.	357,473,447.
JUMLAH BEBAN		6,556,462,722	3,156,675,108.
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,783,907,722)	(2,855,165,108)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(21,121,900).	105,000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9,378,100.	105,000.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		30,500,000.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	360,000.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	360,000.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	(21,121,900)	465,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,805,029,622)	(2,854,700,108)
POS LUAR BIASA	D.9	0.	0.
Beban Luar Biasa		0.	0.
POS LUAR BIASA		0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO		(5,805,029,622)	(2,854,700,108)

Gambar.3

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	11,795,267,935	12,538,178,514.
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(5,805,029,622)	(2,854,700,108)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0.	0.
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	12,887,000	0.
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.5	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6	0.	0.
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	12,887,000	0.
SELISIH REVALUASI ASET	E.8	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.9	0.	0.
LAIN-LAIN	E.10	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	2,531,503,364.	2,207,317,386.
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.12	(596,520,529)	(647,382,722)
EKUITAS AKHIR	E.13	11,198,747,406	11,890,795,792

Gambar 4

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

am

Dasar Hukum entitas
dan rencana strategis

A.1. n

d

a

l

i

a

n

M

u

t

u

d

a

n

K

e

a

m

a

n

a

n

H

a

s

i

l

P

e

r

i

k

a

n

a

n

B

a

t

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan M.Nahar No.01 Batam, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia , pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, upaya perlindungan sumber daya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam berkomitmen dengan :

VISI:

“ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu,Aman ,Konsumsi danTerpercaya.”

MISI :

“Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”.

TUGAS :

“Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu”

FUNGSI :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari

- dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 7. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 8. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 9. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 10. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
 11. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

TUJUAN :

“Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Batam;

9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

Aset

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku	50 tahun

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Rincian DIPA
Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBPNP	650.010.000	650.010.000
Jumlah Pendapatan	650.010.000	650.010.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,055,081,000	3,109,863,000
Belanja Barang	3,111,837,000.	3,111,837,000.
Belanja Modal	59,000,000	59,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6,225,918,000	6,280.7000.000

A.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp781,933,100 atau mencapai 120,3 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.650.100.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023
(dalam Rupiah)

Realisasi Pendapatan
Rp. 781,933,100

	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan		
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0.	0.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.	9,378,100.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0.	9,378,100.
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		

425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	642,010,000.	750,315,000.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	642,010,000.	750,315,000
4253 425332	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	8,000,000.	22,240,00.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	8,000,000	22,240,00.
4259 425911 425912	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0. 0.	0. 0.
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0.	0.
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	650,010,000.	781,933,100
	JUMLAH PENDAPATAN	650,010,000.	781,933,100

(dalam Rupiah)

Realisasi Belanja
Rp. 6.215.470.697

A.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.215.470.697 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.280.700.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,109,863,000.	3,076,088,880.	99
Belanja Barang	3,111,837,000.	3,081,388,817.	96
Belanja Modal	59,000,000	57,993,000	98
Total Belanja Kotor	6.280.700.000.	6,215,470,697	99
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	-	-	-
Jumlah	6.280.700.000.	6,215,470,697	99

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan Belanja Barang untuk mendukung operasional perkantoran dan pelayanan serta pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik. Tahun 2023 jumlah anggaran untuk belanja modal mengalami penurunan dikarenakan anggaran untuk belanja modal dibatasi.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	3,076,088,880.	2,993,142,968.	99
Belanja Barang	3,081,388,817.	2,742,668,175.	99

Belanja Modal	57,993,00	0..	99
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	6,215,470,697	5,735,811,143	99

Belanja Pegawai Rp.
3,076,088,880

periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,076,088,880 dan Rp. 2,993,142,968. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,81 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penerimaan pegawai Non PNS dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.

Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai. Adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan diluar jam kerja sehingga menyebabkan kenaikan signifikan Belanja Lembur.

Belanja Pegawai
Realisasi Belanja
Pegawai untuk

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.307.439.521	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	19.074.030	0	0
Belanja Honorarium/Vakasi	1.369.592.343	0	0
Belanja Lembur	197,517,00	0	0
Belanja Uang makan	178,766,000	0	0
Jumlah Belanja Kotor	3,076,088,894	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	14	0	0
Jumlah Belanja	3,076,088,880	0	0

Belanja Barang
Rp3,081,388,817

A.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,081,388,817 dan Rp0. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 0 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	1,132,973,415	0	0
Belanja Barang Non Operasional	232,391,50	0	0
Belanja Persediaan	211,479,237	0	0
Belanja Jasa	429,642,300	0	0
Belanja Pemeliharaan	425,386,905	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	649,805,960	0	0
Jumlah Belanja Kotor	3,081,679,317	0	0
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	3,081,679,317	0	0

Belanja Modal
Rp. 57,993,000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 57,993,000 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 dikarenakan anggaran untuk belanja modal terkena refocussing atau pemotongan anggaran akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,993,000	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	57,993,000		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	57,993,000		

Belanja Modal Tanah
Rp.0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 57.993.000*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.57.993.000. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Printer	2.300.000		
Server	25.995.000		
Komputer Tablet	2.780.000		
Laptop	14.300.000		
Scanner	5.118.000		
Jumlah Belanja Kotor	57.993.000		
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	57.993.000		

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Gedung Kantor			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal			

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
--------	----------------	----------------	---

Belanja Modal Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

Belanja Modal Lainnya Rp.0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Software			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal			

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar SKIPM Batam 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 124,750,333 dan Rp. 163,588,245.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

*Aset Lancar
Rp. 124,750,333*

Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

C.1.1. Kas di Bendahara

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp.0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBPN	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp.0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	SKIPM Batam	0	-
		0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	SKIPM Batam	0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp.0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitor.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
<hr/>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
<hr/>			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

*Beban Dibayar di
Muka
Rp.0*

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah SKIPM Batam per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima SKIPM Batam per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah		

Persediaan Rp 124,750,333

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 124,750,333 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	41,309,805	
Barang untuk Pemeliharaan	0	
Suku Cadang	428,000	
Bahan baku	83,012,528	
Jumlah	124.750.333	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Rp. 11,354,205,427

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap SKIPM Batam per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 11,354,205,427 dan Rp. 11,649,702,790.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas. Aset Tetap pada SKIPM Batam berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp.15.205.753.697

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.15.205.753.697 dan Rp.15.205.753.697

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	15.205.753.697
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2023	15.205.753.697
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	15.205.753.697

Peralatan dan
Mesin
Rp. 8,389,718,428

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin SKIPM Batam per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,389,718,428 dan Rp.0.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	16,996,679,289
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	24,437,250
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Penghapusan	0
Saldo Per 31 Desember 2023	17.003.989.317
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(7,347,186,931)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	3.303.421.849

Mutasi tambah tidak ada

Transfer Masuk berupa sertifikat kesehatan karantina dari Sekretariat Badan Rp24,437,250

Reklasifikasi Masuk berupa Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah dihentikan penggunaannya.

Koreksi Tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan Mutasi kurang:

Penghapusan Kendaraan Bermotor

Rp. 9,378,100 dan diklasifikasikan sebagai penghapusan aset lain-lain.

Penghapusan sebesar Rp. 9,378,100 merupakan penghapusan kendaraan bwermotor .

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp1,962,797,000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 1,962,797,000 dan Rp7.043.807.862.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	7,043,807,862
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	(0)
Saldo Per 31 Desember 2023	1,962,797,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(292,986,201)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	8.713.618.661

Mutasi tambah tidak ada dan mutasi kurang tidak ada

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.1.520.089.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.520.089.000 dan Rp.1.611.417.460 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.520.089.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	1.520.089.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.444.823.869)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	75.265.131

Mutasi tambah tidak ada

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp.
41,168,000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022		41,168,000
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan		-
Saldo Per 31 Desember 2023		0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023		(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023		41,168,000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan rencana design pembangunan ruang arsip mushala.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.					
Jumlah					

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (9,086,932,001)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (9,086,932,001) dan Rp. (8,763,941,638) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan	8,391,653,428	7,349,121,931	2.441.154.611

	dan Mesin			
2.	Gedung dan Bangunan	1,962,797,000	292,986,201	6.151.503.849
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.520.089.000	1.302.750.869	149.268.099
4.	Aset Tetap Lainnya	41,168,000	0	0
	Jumlah	11.915.707.428	8.944.859.001	2.929.680.427

Piutang Jangka Panjang
Rp.0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada SKIPM Batam merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp.0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	SKIPM Batam	0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran
Rp.0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	SKIPM Batam	0	0
			0
	Jumlah	0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp.0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang SKIPM Batam per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
Lancar	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0
Diragukan	0	0	0
Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

*Aset Lainnya
Rp.0*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.3.400.000.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada SKIPM Batam terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel 21
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Jumlah	

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada SKIPM Batam adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022		0
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Saldo Per 30 Juni 2023		0
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023		0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		0

Mutasi tambah tidak ada

Aset Lain-Lain
Rp.0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah BKIPM Kepulauan Riau dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022		3.400.000
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		0
Mutasi Kurang:		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan		0
Penghapusan BMN		0
Saldo Per 30 Juni 2023		0
Amortisasi s.d. 30 Juni 2023		(0)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023		0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp. 406,680,279

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek SKIPM Batam per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 406,680,279 dan Rp65.364.203.

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup SKIPM Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	SKIPM Batam	0
2.	BKIPM Tj.Pinang	0
	Jumlah	0

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 16,005,200

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 16,005,200 dan Rp. 18,023,100. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor SKIPM Batam per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
Total		

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas Rp. 11,461,100,160

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11,461,100,160 dan Rp 11,795,267,935. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp.
781,933,100

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 781,933,100 dan Rpo. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 29

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9,378,100	0	
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	750,315,000	0	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	22,240,000	0	
Pendapatan Lain-lain	0	0	
Jumlah	781,933,100	0	120,3

Pendapatan akrual pada berasal dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dan pendapatan lain-lain yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu dan pengembalian belanja barang tahun lalu.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp3,076,088,894

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,076,088,894 dan Rp-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji	1.326.513.551	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	1,369,592,343	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	518.869.000	0	0

Beban Uang Makan	182.466.000	0	0
Jumlah Beban	3,076,088,894.	0	0

Beban Persediaan Rp211,479,237

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 211,479,237 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 31
Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)*

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	110,591,079	-	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,045,000	-	0
Beban Persediaan suku cadang	3,682,000	-	0
Beban Persediaan bahan baku	162,323,320	-	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	-	0
Jumlah Beban	211.479.237	-	0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp3,534,050,223.

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,534,050,223. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban barang operasional penanganan pandemic Covid-19, beban jasa penanganan pandemic Covid-19 seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban listrik, langganan daya dan jasa serta beban langganan air, disebabkan adanya efisiensi pola kerja pegawai yaitu penghematan listrik dan air jika tidak digunakan dalam rangka kegiatan operasional pelayanan dan administrasi kantor. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	179.3338.018	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	157.598.800	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	8.929.500	-	-
Beban Honor Operasional Satker	256.752.000	-	-
Beban Bahan	242.623.600	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	106.439.250	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.600.000	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	-	-
Beban Langganan Listrik	358.582.817	-	-
Beban Langganan Telepon	3.422.630	-	-
Beban Sewa	252.733.700	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	99.940.658	-	-
Beban Jasa Lainnya	186.375.000	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.528.000	-	-
Jumlah Beban	3,534,050,223.	-	-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp623,740,631.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan
Rp623,740,631.000

Tabel 33
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.872.400	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	440.868.231	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	623,740,631.000	0	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp.737,229,727.000

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.737,229,727.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.714.054.73	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.415.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	387.409.254	-	-
Jumlah Beban	737,229,727.000	-	-

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	
Jumlah Beban	0		

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1,553,016,544.000

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,553,016,544.000 dan Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.377.084.507	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	169.771.210	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,160,827.000	-	-
Jumlah Penyusutan	1,553,016,544.00	-	-
Beban Amortisasi Software	0	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	1,553,016,544.00	0	0

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional Rp.0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari

Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Beban			

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.26.012.859.717

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.26.012.859.717 dan Rp 27.552.524.512

Defisit LO
Rp.12.912.204.620

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.12.912.204.620 dan Rp.13.318.978.469. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing

adalah sebesar Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp.0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Bogor.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 41

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp.0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.531.503.364

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar

Rp. 2,531,503,364 dan Rp. 2,207,317,386

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 43

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	302,698,100
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,822,343,464
Transfer Masuk	(11.858.000)
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(2,531,503,364)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp.12.781.445.097 sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.858.000 terdiri dari:

Tabel 44

Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Sertifikat	Sekretariat BKIPM	11.858.000
Jumlah			11.858.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 untuk tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	BKIPM Batam	-	0
		-	0
		-	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp.
11,198,747,406.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 11,198,747,406. dan Rp. 11,890,795,792

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Terdapat Konstruksi dalam pengerjaan(KDP) sebesar Rp.30.500.000 yaitu berupa design ruang arsip yang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan anggaran tersebut telah ikut di refocussing di tahun 2022 dan sudah ditindaklanjuti dengan mengajukan penghapusan KDP ke Sekretariat Badan BKIPM, sehingga untuk tahun 2023 ini KDP sudah tidak muncul lagi di neraca. Terdapat kesalahan akun belanja bahan yaitu terdiri dari 1(satu) unit kursi lipat panjang senilai Rp.690.000,1(satu) set mic wireless senilai Rp.2.750.000, 2(dua)pcs lampu 25 watt LED serta 4(empat) pcs obat-obatan senilai Rp.251.000 dan sudah dilakukan perbaikan/koreksi penyesuaian akun belanja.

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
UTAMA DAN TAMBAHAN

REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PERSEDIAAN MASUK (PEROLEHAN LAINNYA)
UNTUK PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 032.13.3200.427649.000.KD
UAKPB : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM

Halaman : 1 dari 1
Tanggal : 27-03-2024

NOMOR DOKUMEN	TGL DOK	TGL BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.06.002.000438	LAMPU LED	2	72,500	145,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.06.002.000439	Lampu Panel	4	60,000	240,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.001.000003	Obat Bentuk Ciar	2	9,000	18,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.001.000003	Obat Bentuk Ciar	2	6,000	12,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.001.000003	Obat Bentuk Ciar	2	9,500	19,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.001.000003	Obat Bentuk Ciar	2	11,000	22,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	9,000	18,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	11,000	22,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	4,000	8,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	3,500	7,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	11,000	22,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	13,000	26,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	10,000	20,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	6,500	13,000
032133200427649000KD202400001M	05-01-2024	05-01-2024	1.01.03.14.002.000001	Obat Padat	2	22,000	44,000
JUMLAH PERSEDIAAN MASUK Perolehan Lainnya							636,000